

**ANALISIS PENGARUH INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA, PDRB PER
KAPITA, DAN JUMLAH PENGANGGURAN
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI
PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Prima Sukmaraga
NIM. C2B605142

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Prima Sukmaraga
Nomor Induk Mahasiswa : C2B605142
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA, PDRB
PER KAPITA, DAN JUMLAH
PENGANGGURAN TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI
PROVINSI JAWA TENGAH**
Dosen Pembimbing : Banatul Hayati, SE., M.Si

Semarang, 8 Februari 2011

Dosen Pembimbing,



(Banutul Hayati, SE., M.Si)
NIP.19680316 199802 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Prima Sukmaraga
Nomor Induk Mahasiswa : C2B605142
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA, PDRB
PER KAPITA, DAN JUMLAH
PENGANGGURAN TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 Februari 2011

Tim Penguji :

1. Banatul Hayati, SE., M.Si

()

2. Prof. Dr. H. Purbayu BS, MS

()

3. Drs. Nugroho SBM, MT

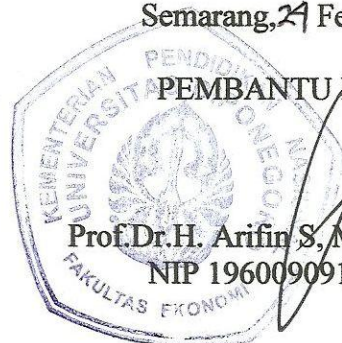
()

Semarang, 27 Februari 2011

PEMBANTU DEKAN I

Prof. Dr. H. Arifin S, Mcom, (Hons).Akt.

NIP 196009091987031023

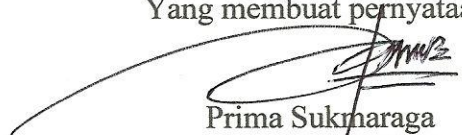


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Prima Sukmaraga**, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 8 Februari 2011
Yang membuat pernyataan,



Prima Sukmaraga
NIM : C2B605142

ABSTRACT

Poverty is a problem faced by all countries in the world, especially developing countries, like Indonesia. Poverty is a complex problem influenced by many interrelated factors, including income levels, unemployment, health, education, access to goods and services, location, geography, gender, and location environment. The number of poor people in Central Java is relatively higher than other provinces in Indonesia, which ranked second in terms of largest number of poor people in Indonesia after the East Java

This study aims to analyze how and how much influence the Human Development Index variables, GDP per capita, and the number of unemployed to the number of poor people in Central Java province in 2008. The method of analysis in this study using multiple linear regression analysis using Ordinary Least Square (OLS) using data across space (cross section) County / City in Central Java province in 2008 with the help of software Eviews 4.1

The results of this study indicate that the variable Human Development Index (HDI) has negative and significant impact on the number of poor people in Central Java province, GDP per capita has a negative and significant impact on the number of poor people in Central Java province, and the number of unemployed has positive and significant effect number of poor people in Central Java Province.

Keywords: Number of Poor People, the Human Development Index (HDI), GDP per capita, and Total Unemployment

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia, yaitu menempati peringkat kedua dalam hal jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang menggunakan data antar ruang (*cross section*) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dengan bantuan *software Eviews 4.1*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya penulis sampai saat ini masih diberikan bermacam kenikmatan tiada ternilai harganya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Adalah suatu hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro beserta Staf pengajar, Staf Administrasi, Tata Usaha serta Staf keamanan dan pihak-pihak intern Fakultas yang lain yang selama ini membantu proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
2. Ibu Banatul Hayati, SE., Msi, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, solusi, dan kebijaksanaannya selama ini.
3. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE., Msi, selaku Koordinator Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Terima kasih atas kebijaksanaan serta motivasinya kepada penulis.
4. Ibu Johanna Maria Kodoatie, SE., M.Ec, Ph.D selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis selama Penulis belajar di Fakultas Ekonomi Undip.
5. Ayah dan Bunda tercinta, terima kasih atas segala kepercayaan, kasih sayang yang tulus, dukungan, materi, fasilitas, serta tak lupa terima kasih atas doanya.
6. Kakakku, adikku, dan Mba Ning terima kasih atas segala motivasinya.
7. Petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu penulis dalam perolehan data.

8. Seluruh keluarga besar IESP 05: Prist, Glor, Wiwid, dan Ria, Panji, Hafid, Cholif, Pipit, Hera, Indah, Ruth, Roni, Ariska, Fita, Dini, Naning, Mbak Dinar, Gadang, Andi, Andri, Antok, Deva, Reza, Hawik, Iwan, Bono, Candra, Edwin, Ibonk, Bowo, Pradana, Gilang, Yardin yang telah bersama-sama menimba ilmu di kampus ini.
9. Tim KKN Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Tahun 2009: Mas Candra, Mba Titin, Danar, Sylvia, Uzlifatul, Mas Adib, Adi, Rifki, Rosi, Widuri, Setyo, Kiki, Nana, Nindita, Yunus, Astyka, Ibnu, Dwi, Rani, David, Winata, Endra, Mba Sukma, Saguvita, Eka, Marita, Mba Desi, Mas Areif, dan Senoaji (35 lima hari bersama menjadi saudara, kita tetap saudara).
10. Untuk sahabat-sahabatku: R. Erwin Bagus Handoko, Moch. Chafid R, Arthana Cakti Widhiatmoko, Krisna Nur Pribadi, Rengganis Puspita Resi, Annisa Rachmawati, Yuwandha Nandya Putri, Arya Pradana, Yustika A Tiok, Rayi Mutia Aprilliani, Rezky Novadika, Reza Mahardika, Krido Priyambodo, Andi Fitriyono, Gatot Caesario Tolando, Reza Primanda Adi, Annisa Meta Cempaka Wangi, Ignatius Candra, Cholif Prasetyo, Yunanto Puji K., dan Indah Kartini (senang bersama kalian).
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ikut mendo'akan semoga semua amal kebaikan pihak-pihak sebagaimana tercantum diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Semarang, 8 Februari 2011


Prima Sukmaraga
C2B605142

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II TELAAH PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori.....	20
2.1.1 Definisi dan Ukuran Kemiskinan	20
2.1.2 Indikator Kemiskinan	23
2.1.3 Penyebab Kemiskinan	26
2.1.4 Teori Lingkaran Kemiskinan	26
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	28
2.1.6 PDRB Per Kapita.....	31
2.1.7 Pengangguran	33
2.1.8 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	35
2.1.9 Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	36
2.1.10 Pengaruh Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	37
2.2 Penelitian Terdahulu	38
2.3 Kerangka Pemikiran	47
2.4 Hipotesis	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	52
3.2 Jenis dan Sumber Data	55
3.3 Metode Pengumpulan Data	55
3.4 Metode Analisis	56
3.4.1 Analisis Regresi	56
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	57
3.4.3 Uji Statistik	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64

4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	64
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	64
4.1.2	Kondisi Kependudukan Jawa Tengah	66
4.1.3	Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	70
4.1.4	Jumlah Penduduk Miskin	71
4.1.5	Indeks Pembangunan Manusia	75
4.1.6	PDRB Per Kapita	79
4.1.7	Jumlah Pengangguran	82
4.2	Analisis Data	85
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	86
4.2.2	Uji Statistik Analisis Regresi	89
4.3	Intepretasi Hasil	90
BAB V	PENUTUP	95
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Keterbatasan	97
5.3	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia Tahun 2008	4
Tabel 1.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008	6
Tabel 1.3 Perkembangan dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008	9
Tabel 1.4 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008	11
Tabel 1.5 Jumlah dan Pertumbuhan Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Jawa Tengah Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2008	67
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008	68
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk di Jawa Tengah Tahun 2008.....	69
Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Sektor Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2008 ...	70
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2008	73
Tabel 4.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008	77
Tabel 4.7 PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008	80
Tabel 4.8 Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008	83

Tabel 4.9	Hasil Regresi Utama	85
Tabel 4.10	Hasil Uji <i>Langrange Multiplier</i> (LM)	87
Tabel 4.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas	87
Tabel 4.12	Hasil R^2 <i>auxiliary regression</i>	88
Tabel 4.13	Nilai <i>t-statistic</i>	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier 27
Gambar 2.2	Lingkaran Kemiskinan dari Nurkse 28
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran..... 50
Gambar 4.1	Peta Administratif Provinsi Jawa Tengah 66
Gambar 4.2	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 74
Gambar 4.3	Persentase Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 78
Gambar 4.4	Persentase PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 81
Gambar 4.5	Persentase Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 84
Gambar 4.6	Uji Normalitas 86

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Mentah	103
Lampiran B Hasil Regresi Utama	104
Lampiran C Hasil Uji Asumsi Klasik	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan.

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD'45, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal itu berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan

kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003).

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan (*vicious cyrcle of poverty*).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material maupun non material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan-kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimannya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sikap dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Kemudian ketidakadilan sosial ekonomi, selain oleh beragam alasan juga

disebabkan oleh praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sehat. Berikut adalah gambaran umum penduduk miskin menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia Tahun 2008 :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin
Menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia
Tahun 2008 (Jiwa)

Propinsi	Perkotaan (K)	Pedesaan (D)	K+D
Nanggroe Aceh Darussalam	189.300	773.000	962.300
Sumatera Utara	721.600	889.900	1.611.500
Sumatera Barat	124.200	349.500	473.700
Riau	260.100	324.600	584.700
Jambi	120.000	141.200	261.200
Sumatera Selatan	498.200	756.100	1.254.300
Bengkulu	116.100	212.700	328.900
Lampung	375.200	1.222.700	1.597.800
Bangka Belitung	33.300	47.000	80.300
Kepulauan Riau	64.500	67.300	131.800
DKI Jakarta	342.500	-	342.500
Jawa Barat	2.645.900	2.603.600	5.249.500
Jawa Tengah	2.523.500	3.599.100	6.122.600
DI Yogyakarta	324.800	284.100	608.900
Jawa Timur	2.308.800	4.240.200	6.549.000
Banten	367.300	463.100	830.400
Bali	107.200	98.500	205.700
Nusa Tenggara Barat	548.400	520.500	1.068.800
Nusa Tenggara Timur	115.300	990.500	1.105.800
Kalimantan Barat	120.100	382.700	502.800
Kalimantan Tengah	41.700	152.600	194.300
Kalimantan Selatan	76.400	134.700	211.100
Kalimantan Timur	85.600	173.900	259.500
Sulawesi Utara	68.700	149.500	218.200
Sulawesi Tengah	58.200	467.000	525.200
Sulawesi Selatan	145.500	896.700	1.042.200
Sulawesi Tenggara	28.500	408.600	437.100
Gorontalo	29.700	153.200	182.900
Sulawesi Barat	47.400	109.500	156.900
Maluku	43.100	345.700	388.800
Maluku Utara	9.300	98.500	107.900
Papua Barat	12.000	225.300	237.300
Papua	34.100	675.200	709.300

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008

Dari Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia berada di Propinsi Jawa Timur dengan proporsi penduduk kota sebesar 2.308.800 jiwa dan penduduk desa sebesar 4.240.200 jiwa sehingga totalnya

sebesar 6.549.000 jiwa. Sedangkan Propinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Indonesia dengan proporsi penduduk kota sebesar 2.523.500 jiwa dan penduduk desa sebesar 3.599.100 jiwa sehingga totalnya sebesar 6.122.600 jiwa.

Kondisi kemiskinan di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya jumlah penduduk miskin jika di bandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Kemiskinan merupakan issue strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Hal tersebut terbukti selain di dalam Renstra Jawa Tengah (Perda No. 11/2003), Pergub 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra, Keputusan Gubernur No. 412.6.05/55/2006 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) juga di dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah tahun 2005-2025, kemiskinan merupakan salah satu dari issue strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Terkait dengan target tujuan pembangunan millenium yang harus tercapai pada tahun 2015, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai target tersebut, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Adapun data jumlah dan pertumbuhan penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat di lihat dari Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2006-2008

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ji wa)			Pertumbuhan (%)	
	2006	2007	2008	2007	2008
Kab. Cilacap	402.100	363.600	343.900	-9,57	-5,42
Kab. Banyumas	362.200	333.000	340.700	-8,06	2,31
Kab. Purbalangga	262.900	246.300	221.900	-6,31	-9,91
Kab. Banjarnegara	251.300	232.900	200.600	-7,32	-13,87
Kab. Kebumen	388.700	362.400	334.900	-6,77	-7,59
Kab. Purworejo	162.300	146.000	130.000	-10,04	-10,96
Kab. Wonosobo	257.500	241.400	207.500	-6,25	-14,04
Kab. Magelang	199.100	200.100	190.800	0,50	-4,65
Kab. Boyolali	184.600	167.000	158.400	-9,53	-5,15
Kab. Klaten	257.400	249.100	243.100	-3,22	-2,41
Kab. Sukoharjo	126.500	113.800	99.100	-10,04	-12,92
Kab. Wonogiri	262.900	237.400	201.100	-9,70	-15,29
Kab. Karanganyar	148.600	138.900	125.900	-6,53	-9,36
Kab. Sragen	201.900	180.700	177.100	-10,50	-1,99
Kab. Grobogan	361.900	330.400	262.000	-8,70	-20,70
Kab. Blora	197.600	176.800	155.100	-10,53	-12,27
Kab. Rembang	188.500	174.300	154.700	-7,53	-11,24
Kab. Pati	256.500	228.800	207.200	-10,80	-9,44
Kab. Kudus	91.600	82.400	97.800	-10,04	18,69
Kab. Jepara	123.600	111.200	119.200	-10,03	7,19
Kab. Demak	263.500	238.900	217.200	-9,34	-9,08
Kab. Semarang	120.700	110.100	102.500	-8,78	-6,90
Kab. Temanggung	114.900	115.000	114.700	0,09	-0,26
Kab. Kendal	198.700	192.700	168.200	-3,02	-12,71
Kab. Batang	134.400	139.800	122.000	4,02	-12,73
Kab. Pekalongan	190.000	170.000	164.300	-10,53	-3,35
Kab. Pemasang	338.200	307.100	325.200	-9,20	5,89
Kab. Tegal	289.700	258.600	220.700	-10,74	-14,66
Kab. Brebes	533.100	492.200	459.300	-7,67	-6,68
Kota Magelang	14.500	13.000	14.900	-16,13	14,62
Kota Surakarta	77.600	69.800	83.400	-10,05	19,48
Kota Salatiga	15.200	15.600	14.900	2,63	-4,49
Kota Semarang	77.800	77.600	89.600	-0,26	15,46
Kota Pekalongan	19.900	17.900	28.000	-10,05	56,42
Kota Tegal	24.700	22.200	26.800	-10,12	20,72
Jumlah	7.100.600	6.557.000	6.122.600	-7,67	-6,62

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2006-2008

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah

masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Namun demikian masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang menunjukkan kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat selama periode tersebut, yaitu pada Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten

Pemalang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circke of poverty*) dari Nurkse 1953. Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas

sumber daya manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

Tabel 1.3
Perkembangan dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2006-2008

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Pertumbuhan (%)	
	2006	2007	2008	2007	2008
Kab. Cilacap	69,8	70,2	70,9	0,67	0,93
Kab. Banyumas	70,8	71,2	71,8	0,59	0,80
Kab. Purbalingga	69,9	70,3	70,9	0,73	0,74
Kab. Banjarnegara	68,3	65,5	69,0	0,42	0,67
Kab. Kebumen	69,5	69,9	70,2	0,66	0,34
Kab. Purworejo	70,2	70,6	71,3	0,66	0,88
Kab. Wonosobo	68,8	69,2	69,5	0,68	0,40
Kab. Magelang	70,6	71,0	71,4	0,54	0,52
Kab. Boyolali	69,4	69,6	70,0	0,37	0,53
Kab. Klaten	71,8	72,4	72,9	0,92	0,58
Kab. Sukoharjo	71,7	72,4	73,0	1,03	0,75
Kab. Wonogiri	69,9	70,1	70,5	0,31	0,56
Kab. Karanganyar	71,1	71,5	72,2	0,70	0,85
Kab. Sragen	67,8	68,9	69,6	1,80	0,90
Kab. Grobogan	69,2	69,7	70,2	0,77	0,65
Kab. Blora	68,4	69,1	69,6	1,01	0,71
Kab. Rembang	69,7	70,5	71,1	1,21	0,79
Kab. Pati	71,8	71,8	72,3	0,13	0,60
Kab. Kudus	71,3	71,6	72,0	0,49	0,47
Kab. Jepara	70,0	71,4	71,9	2,14	0,63
Kab. Demak	70,3	71,0	71,6	1,01	0,77
Kab. Semarang	72,2	72,9	73,3	1,05	0,51
Kab. Temanggung	72,7	73,0	73,4	0,47	0,44
Kab. Kendal	68,3	68,9	69,4	0,89	0,71
Kab. Batang	68,4	68,6	69,2	0,35	0,82
Kab. Pekalongan	69,4	69,6	70,3	0,48	0,88
Kab. Pemasang	67,4	67,8	68,4	0,79	0,75
Kab. Tegal	67,8	66,8	69,5	-1,47	4,00
Kab. Brebes	65,9	66,5	67,1	1,03	0,80
Kota Magelang	75,5	75,6	76,1	0,26	0,54
Kota Surakarta	76,4	76,5	77,2	0,29	0,81
Kota Salatiga	75,1	75,3	75,8	0,41	0,57
Kota Semarang	75,9	76,1	76,5	0,22	0,51
Kota Pekalongan	72,5	73,1	73,5	0,77	0,55
Kota Tegal	72,4	72,7	73,2	0,46	0,66

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2006-2008

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2006 sampai dengan 2008 mengalami fluktuasi setiap tahunnya seperti pada Kabupaten Tegal. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya mengalami peningkatan selama tahun 2006 sampai dengan 2008. Kota Surakarta memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, yaitu sebesar 76,4 pada tahun 2006 kemudian meningkat sebesar 0,29 menjadi 76,5 pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 meningkat sebesar 0,81 menjadi 77,2.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2001). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Berikut disajikan data perkembangan dan pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 1.4
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB per kapita
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2006-2008

Kabupaten/Kota	PDRB perkapita (rupiah)			Pertumbuhan (%)	
	2006	2007	2008	2007	2008
Kab. Cilacap	6.551.252	6.863.610	7.185.351	4,77	4,69
Kab. Banyumas	2.522.061	2.646.187	2.775.818	4,92	4,90
Kab. Purbalingga	2.471.848	2.608.376	2.725.908	5,52	4,51
Kab. Banjarnegara	2.764.666	2.888.146	3.012.254	4,47	4,30
Kab. Kebumen	2.045.176	2.127.930	2.234.113	4,05	4,99
Kab. Purworejo	3.405.066	3.602.377	3.789.442	5,79	5,19
Kab. Wonosobo	2.155.371	2.225.669	2.297.799	3,26	3,24
Kab. Magelang	2.952.887	3.085.090	3.212.407	4,48	4,13
Kab. Boyolali	3.879.592	4.018.207	4.155.036	3,57	3,41
Kab. Klaten	3.777.233	3.893.060	4.031.026	3,07	3,54
Kab. Sukoharjo	5.064.096	5.284.141	5.492.630	4,35	3,95
Kab. Wonogiri	2.583.604	2.710.930	2.819.122	4,93	3,99
Kab. Karanganyar	5.504.414	5.778.118	6.057.749	4,97	4,84
Kab. Sragen	2.852.484	3.010.445	3.171.902	5,54	5,36
Kab. Grobogan	2.034.814	2.110.729	2.206.649	3,73	4,54
Kab. Blora	2.100.600	2.177.959	2.291.493	3,68	5,21
Kab. Rembang	3.374.785	3.491.053	3.636.670	3,45	4,17
Kab. Pati	3.235.894	3.396.703	3.552.462	4,97	4,59
Kab. Kudus	14.271.857	14.537.076	14.828.579	1,86	2,01
Kab. Jepara	3.349.562	3.467.372	3.566.052	3,52	2,85
Kab. Demak	2.525.409	2.611.077	2.695.119	3,39	3,22
Kab. Semarang	5.221.745	5.410.191	5.573.832	3,61	3,02
Kab. Temanggung	2.964.448	3.058.053	3.135.698	3,16	2,54
Kab. Kendal	4.790.086	4.928.583	5.049.198	2,89	2,45
Kab. Batang	2.990.898	3.082.849	3.178.990	3,07	3,12
Kab. Pekalongan	3.234.705	3.357.692	3.487.316	3,80	3,86
Kab. Pemasang	2.130.821	2.202.651	2.285.280	3,37	3,75
Kab. Tegal	2.100.604	2.210.953	2.321.422	5,25	5,00
Kab. Brebes	2.577.758	2.685.422	2.794.524	4,18	4,06
Kota Magelang	6.922.287	7.157.552	7.383.009	3,40	3,15
Kota Surakarta	7.930.485	8.316.547	8.699.634	4,87	4,61
Kota Salatiga	4.392.164	4.537.407	4.663.212	3,31	2,77
Kota Semarang	11.658.924	12.187.352	12.676.256	4,53	4,01
Kota Pekalongan	6.450.898	6.658.330	6.858.912	3,22	3,01
Kota Tegal	4.411.430	4.625.357	4.850.637	4,85	4,87

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2006-2008

Dari Tabel 1.4 terlihat bahwa PDRB per kapita seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 sampai tahun 2008 mengalami kecenderungan yang meningkat. Selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008

Kabupaten Kudus mempunyai PDRB per kapita tertinggi sebesar 14.271.857 rupiah dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 1,86 persen menjadi 14.537.076 rupiah dan meningkat kembali pada tahun 2008 sebesar 2,01 persen menjadi 14.828.579 rupiah. Sedangkan PDRB per kapita terendah yaitu terdapat pada Kabupaten Grobogan sebesar 2.034.814 rupiah pada tahun 2006, kemudian 1.951.803 rupiah dan pada tahun 2007 serta sebesar 2.110.729 rupiah dan meningkat kembali pada tahun 2008 sebesar 2.206.649 rupiah.

Selain faktor-faktor di atas, adapula indikator lain yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu seberapa besar jumlah pengangguran yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Berikut ini disajikan data jumlah dan pertumbuhan pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 1.5
Jumlah dan Pertumbuhan Pengangguran
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2006-2008

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengangguran (jiwa)			Pertumbuhan (%)	
	2006	2007	2008	2007	2008
Kab. Cilacap	71.338	93.016	75.495	30,39	-18,84
Kab. Banyumas	57.800	58.273	57.620	0,82	-1,12
Kab. Purbalangga	17.187	32.008	29.058	86,23	-9,22
Kab. Banjarnegara	29.613	30.563	22.464	3,21	-26,50
Kab. Kebumen	53.030	45.193	35.304	-14,78	-21,88
Kab. Purworejo	14.973	21.257	15.364	41,97	-27,72
Kab. Wonosobo	11.838	23.258	21.290	96,47	-8,46
Kab. Magelang	38.914	42.462	31.602	9,12	-25,58
Kab. Boyolali	22.744	41.517	31.656	82,54	-23,75
Kab. Klaten	49.365	52.113	44.454	5,57	-14,70
Kab. Sukoharjo	35.867	44.532	36.379	24,16	-18,31
Kab. Wonogiri	27.722	29.563	31.945	6,64	8,06
Kab. Karanganyar	24.695	30.840	25.700	24,88	-16,67
Kab. Sragen	19.644	31.318	26.870	59,43	-14,20
Kab. Grobogan	37.267	45.080	43.657	20,96	-3,16
Kab. Blora	18.081	19.185	26.166	6,11	36,39
Kab. Rembang	21.593	17.844	17.571	-17,36	-1,53
Kab. Pati	52.744	55.607	59.012	5,43	6,12
Kab. Kudus	22.517	31.246	27.205	38,77	-12,93
Kab. Jepara	16.189	33.031	30.426	104,03	-7,89
Kab. Demak	34.954	40.154	35.569	14,88	-11,42
Kab. Semarang	28.071	48.661	37.842	73,35	-22,23
Kab. Temanggung	17.352	28.732	18.941	65,58	-34,08
Kab. Kendal	40.786	30.327	32.929	-25,64	8,58
Kab. Batang	31.536	30.843	31.574	-2,20	2,37
Kab. Pekalongan	31.830	35.802	31.380	12,48	-12,35
Kab. Pemasang	74.502	55.792	60.483	-25,11	8,41
Kab. Tegal	60.806	69.196	64.281	13,80	-7,10
Kab. Brebes	101.083	81.094	65.357	-19,77	-19,41
Kota Magelang	5.766	7.855	7.639	36,23	-2,75
Kota Surakarta	24.090	26.770	26.574	11,12	-0,73
Kota Salatiga	11.108	9.833	9.816	-11,48	-0,17
Kota Semarang	68.810	85.249	85.710	23,89	0,54
Kota Pekalongan	13.692	13.399	13.818	-2,14	3,13
Kota Tegal	9.737	18.606	16.157	91,09	-13,16

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2006-2008

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas terlihat bahwa jumlah pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami fluktuasi. Banyak daerah yang mengalami peningkatan angka

penganggurannya pada tahun 2007 dikarenakan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memaksa produsen untuk mengurangi faktor produksinya salah satunya adalah jumlah tenaga kerjanya.

Jumlah pengangguran tertinggi pada tahun 2006 berada di Kabupaten Brebes sebesar 101.083 jiwa, kemudian mengalami penurunan sebesar -19,77 persen menjadi 81.094 jiwa pada tahun 2007 dan menurun kembali sebesar -19,41 persen menjadi 65.357 jiwa di tahun 2008. Sedangkan jumlah pengangguran terkecil pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 di Jawa Tengah berada di Kota Magelang sebesar 5.766 jiwa di tahun 2006, untuk selanjutnya meningkat sebesar 36,23 persen menjadi 7.855 jiwa di tahun 2007 untuk selanjutnya menurun sebesar -2,75 persen menjadi 7.639 jiwa pada tahun 2008.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. Untuk pengolahan data akan digunakan metode regresi *cross section* atau data antar ruang.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2008 relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Hal ini tampak pada Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah menempati peringkat kedua penduduk miskin terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur. Kondisi jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun. Namun demikian masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang menunjukkan kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat, yaitu pada Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal (Tabel 1.2).

Penyebab kemiskinan adalah lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (IPM) menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas berakibat rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, sehingga akumulasi modal rendah dan berdampak pada terbatasnya lapangan kerja dan berarti meningkatnya jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Kondisi beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal menunjukkan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tetapi tidak diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin (Tabel 1.2 dan

Tabel 1.3) padahal menurut penelitian Apriliyah S. Napitupulu (2007), bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi perkapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Pada sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal menunjukkan adanya peningkatan PDRB per kapita, tetapi tidak diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin (Tabel 1.2 dan Tabel 1.4). Secara teoritis seharusnya peningkatan PDRB per kapita akan menurunkan jumlah penduduk miskin, seperti hasil penelitian Rima Prihartanty (2008), bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Kondisi lain yang dihadapi beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 seperti Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang adalah adanya peningkatan jumlah pengangguran tetapi ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin (Tabel 1.2 dan Tabel 1.5) padahal menurut penelitian Dian Octaviani (2001), bahwa jumlah pengangguran erat kaitanya dengan kemiskinan

di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Dari masalah tersebut, muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2008?
2. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2008?
3. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2008?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

3. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan sedemikian rupa, sehingga apa yang dikemukakan akan lebih mudah dipahami. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka, didalamnya dibahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Selain itu terdapat juga penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis.

- Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.
- Bab IV : Hasil dan Pembahasan, berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data serta pembahasan mengenai hasil penelitian.
- Bab V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan *multi dimensional*, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari

kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Lincoln Arshad, 1999).

Menurut PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Lincoln Arshad, 1999), secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development* (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu :

1. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.
2. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup.
3. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh *Internasional Labor Organization* (ILO, 1976) sebagai berikut:

Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur: pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural (Lincoln Arshad, 1999).

2.1.2 Indikator Kemiskinan

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun pada umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah

Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Garis kemiskinan dibedakan menurut tempat dan waktu, jadi setiap daerah baik di desa maupun di kota memiliki nilai yang berbeda-beda dan biasanya nilai ini bertambah pada norma tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting

terutama dalam hal pengukuran kemiskinan. Batas garis kemiskinan dibedakan antara desa dan kota. Perbedaan ini sangat signifikan antara di desa dan di kota, hal ini disebabkan pada perbedaan dan kompleksitas di desa dan di kota.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

2.1.3 Penyebab Kemiskinan

Sharp (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

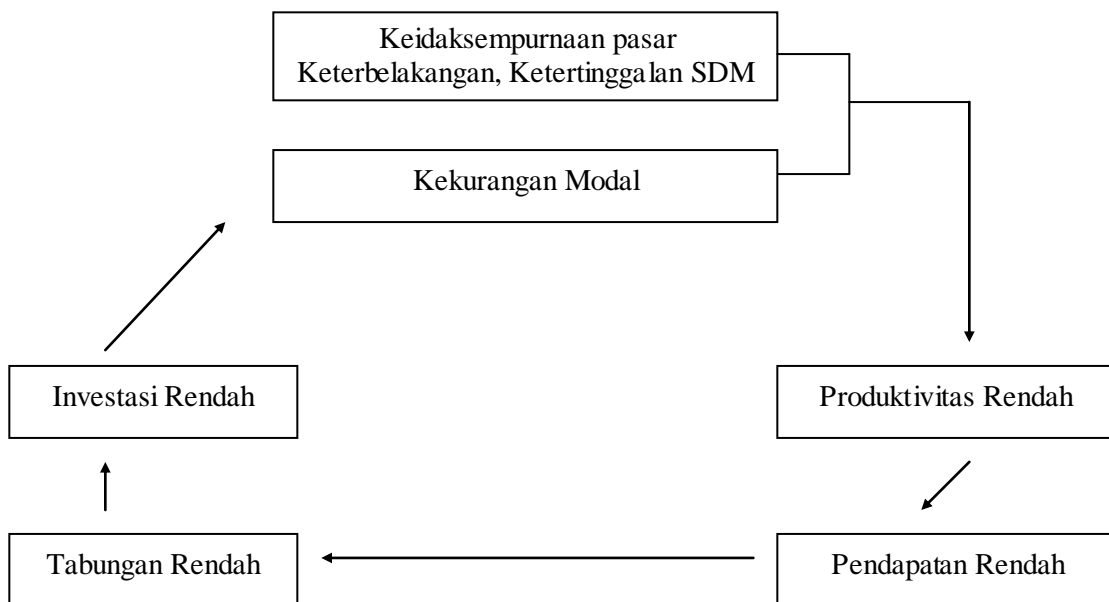
1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

2.1.4 Teori Lingkaran Kemiskinan

Ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan

yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan “ *a poor country is a poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 2.1
Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier

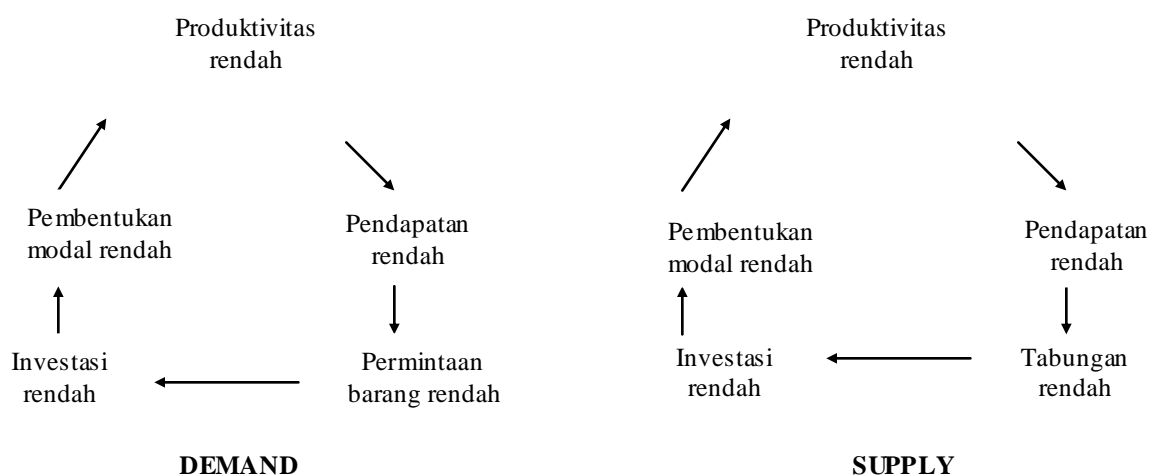


Sumber: Mudrajat Kuncoro, 1997

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi

permintaan (*demand*), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

Gambar 2.2
Lingkaran Kemiskinan yang Tidak Berujung Pangkal dari Nurkse



Sumber: Suryana, 2000

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB-dalam konteks nasional dan PDRB-dalam konteks regional, hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Untuk itu dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif, yang mampu menangkap tidak saja perkembangan ekonomi akan tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks

pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini :

- Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup;
- Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi; dan

- Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP).

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut (IPM Jateng 2007):

- ❖ Tahap pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak)

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min}) \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

X_i : indikator komponen pembangunan manusia ke- i , $i = 1,2,3$
 X_{\min} : nilai minimum X_i
 X_{\max} : nilai maksimum X_i

- ❖ Tahap kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata dari masing-masing indeks X_i .

$$\text{IPM} = (\text{indeks } X_1 + \text{indeks } X_2 + \text{indeks } X_3) / 3 \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana :

X_1 : indeks angka harapan hidup
 X_2 : indeks tingkat pendidikan
 X_3 : indeks standar hidup layak.

- ❖ Tahap ketiga adalah menghitung Reduksi Shortfall, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

$$r = \{ (\text{IPM}_{t+n} - \text{IPM}_t) / (\text{IPM ideal} - \text{IPM}_t) \}^{1/n} \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana :

IPM_t : IPM pada tahun t
 IPM_{t+n} : IPM pada tahun t+n
 IPM ideal : 100

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut :

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

2.1.6 PDRB per kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga kosntan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua

komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.

2.1.7 Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sadono Sukirno, 2000).

Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Menurut Edgar O. Edwards (dalam Lincoln Arsyad, 1999), untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Waktu (banyak diantara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama, misal jam kerjanya per hari, per minggu, atau per bulan).
2. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).
3. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumberdaya-sumberdaya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Berdasarkan hal-hal diatas Edwards memberikan bentuk-bentuk pengangguran adalah:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
2. Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.

3. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sadono Sukirno, 2004).

Jumlah pengangguran menurut BPS (2008) adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

2.1.8 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Apriliyah S. Napitupulu (2007), mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita.

Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.9 Pengaruh PDRB Per kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi

di antara berbagai negara (Lincoln Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (Thamrin, 2000). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna Amijaya (2008) mengatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2.1.10 Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Lincoln Arsyad, 1999). Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada.

Menurut Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa jumlah pengangguran erat kaitanya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian

besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Kadangkala ada juga pekerja diparkoran yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan diberbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008) dengan judul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”. Tulisannya meneliti tentang pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, dalam hal ini untuk seluruh Provinsi di Indonesia dari tahun 2003 – 2004. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.

Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$MS = f(GR, PDRB, PG)$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + U_{it}$$

Dimana:

MS	= jumlah kemiskinan.
GR	= variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan.
PDRB	= variabel tingkat pertumbuhan ekonomi.
PG	= variabel tingkat pengangguran.
<i>i</i>	= <i>cross section</i> .
<i>t</i>	= <i>time series</i> .
<i>B0</i>	= konstanta.
<i>B1, B2, B3</i>	= koefisien.
<i>U</i>	= <i>error</i> .

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

- b) Penelitian yang dilakukan oleh Rima Prihartanty (2008) dengan judul "Analisis Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Studi kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah". Tulisannya meneliti tentang Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Studi kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Analisis yang dilakukan menggunakan Regresi dengan menggunakan panel data dengan OLS. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + U_{it}$$

Dimana:

Y	= jumlah penduduk miskin (Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)
X1	= pertumbuhan ekonomi
X2	= ketimpangan distribusi
β	= koefisien regresi
U	= <i>disturbance</i>

i = *intercept cross section*
 t = *intercept time*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Apriliyah S. Napitupulu (2007) dengan judul "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara". Tulisannya meneliti tentang pengaruh indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Analisis yang dilakukan menggunakan Regresi linier berganda dengan *ordinary least square/OLS*. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Dimana :

Y = jumlah penduduk miskin Sumatera Utara (jiwa)
 X1 = angka harapan hidup (tahun)
 X2 = angka melek huruf (persen)
 X3 = konsumsi perkapita (rupiah)
 μ = tern of error
 β = koefisien regresi
 α = intercept

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi perkapita mempunyai

pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

- d) Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006) dengan judul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Poverty} = & \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{Populasi} + \beta_3 \text{Agrishare} + \beta_4 \text{Industrieshare} \\ & + \beta_5 \text{Inflasi} + \beta_6 \text{SMP} + \beta_7 \text{SMA} + \beta_8 \text{DIPLOMA} + \beta_9 \text{Dummy} \\ & \text{Krisis} + \varepsilon \end{aligned}$$

Dimana:

Poverty	= tingkat kemiskinan
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
Agrishare	= pangsa sektor pertanian dalam PDRB
Industrieshare	= pangsa sektor industri dalam PDRB
Inflasi	= tingkat inflasi
SMP	= jumlah lulusan setingkat SMP
SMA	= jumlah lulusan setingkat SMA
DIPLOMA	= jumlah lulusan setingkat Diploma
Dummy Krisis	= dummy krisis ekonomi

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Share pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka

kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik SMP lebih besar dari pada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan.

- e) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani (2001) dengan judul “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri yang dikemukakan oleh Cutler dan Katz (1991), yaitu :

$$P_t = \beta_0 + \beta_1 (P/Y)_T + \beta_2 \rho_T + \beta_3 \mu_t + \beta_4 G_t + \epsilon_t$$

Dimana :

- P_t = tingkat kemiskinan agregat pada tahun ke t diukur dengan indeks FGT
 $(P/Y)_t$ = rasio garis kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata
 ρ_T = tingkat inflasi
 G_t = rasio gini
 μ_t = tingkat pengangguran
 ϵ_t = *error term*

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat di Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Model Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
<p>Deny Tisna Amijaya (2008)</p> <p>“Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”</p>	<p>$MS = f (GR, PDRB, PG)$</p> <p>$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + U_{it}$</p> <p>Dimana:</p> <p>MS = jumlah kemiskinan. GR = variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan. PDRB = variabel tingkat pertumbuhan ekonomi. PG = variabel tingkat pengangguran. <i>i</i> = <i>cross section</i>. <i>t</i> = <i>time series</i>. <i>B0</i> = konstanta. <i>B1, B2, B3</i> = koefisien. <i>U</i> = <i>error</i>.</p>	<p>Analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.</p>

<p>Rima Prihartanty, 2008</p> <p>Analisis Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Studi kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah</p>	$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + U_{it}$ <p>Dimana: Y = jumlah penduduk miskin (Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) X1 = pertumbuhan ekonomi X2 = ketimpangan distribusi β = koefisien regresi U = <i>disturbance</i> i = <i>intercept cross section</i> t = <i>intercept time</i></p>	<p>Regresi dengan menggunakan panel data dengan OLS</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang diukur dengan banyaknya jumlah penduduk miskin sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan angka Gini Rasio berpengaruh positif terhadap kemiskinan.</p>
<p>Apriliyah S. Napitupulu (2007)</p> <p>Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara</p>	$Y = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \beta_4 X4 + \mu$ <p>Dimana :</p> <p>Y = jumlah penduduk miskin Sumatera Utara (jiwa) X1 = angka harapan hidup (tahun) X2 = angka melek huruf (persen) X3 = konsumsi perkapita (rupiah) μ = <i>tern of error</i> β = koefisien regresi α = <i>intercept</i></p>	<p>Regresi linier berganda dengan ordinary least square / OLS</p>	<p>Dari ketiga variabel yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi perkapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.</p>

<p>Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006)</p> <p>“Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”</p>	$\text{Poverty} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{Populasi} + \beta_3 \text{Agrishare} + \beta_4 \text{Industriesshare} + \beta_5 \text{Inflasi} + \beta_6 \text{SMP} + \beta_7 \text{SMA} + \beta_8 \text{DIPLOMA} + \beta_9 \text{Dummy Krisis} + \varepsilon$ <p>Dimana:</p> <p>Poverty = tingkat kemiskinan PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Agrishare = pangsa sektor pertanian dalam PDRB Industriesshare = pangsa sektor industri dalam PDRB Inflasi = tingkat inflasi SMP = jumlah lulusan setingkat SMP SMA = jumlah lulusan setingkat SMA DIPLOMA = jumlah lulusan setingkat Diploma Dummy Krisis = dummy krisis ekonomi</p>	<p>Analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.</p>	<p>Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan Jumlah Penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Share pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik SMP lebih besar dari pada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan.</p>
--	---	---	--

<p>Dian Octaviani (2001)</p> <p>“Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke”.</p>	$P_t = \beta_0 + \beta_1 (P/Y)_T + \beta_2 \rho_T + \beta_3 \mu_t + \beta_4 G_t + \varepsilon_t$ <p>Dimana:</p> <p>P_t = tingkat kemiskinan agregat pada tahun ke t diukur dengan indeks FGT</p> <p>$(P/Y)_t$ = rasio garis kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata</p> <p>ρ_T = tingkat inflasi</p> <p>G_t = rasio gini</p> <p>μ_t = tingkat pengangguran</p> <p>ε_t = <i>error term</i></p>	<p>Model ekonometri Cutler dan Katz</p>	<p>Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.</p>
---	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengentasan penduduk miskin saat ini masih merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang senantiasa menyita perhatian, karena masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek. Walaupun sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai. Sulitnya penyelesaian masalah ini, disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin sangat kompleks.

Penduduk miskin menurut BPS (2010) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk

dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circke of poverty*) dari Nurkse 1953. Adanya keterbelakngan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Berbagai upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin, salah satunya adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Todaro (2000) pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Sehingga pembangunan manusia memiliki peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Apriliyah S. Napitupulu (2007) mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin

tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

PDRB per kapita merupakan suatu masalah yang sangat berhubungan dengan jumlah penduduk miskin. Menurut Sadono Sukirno (2000) laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga.

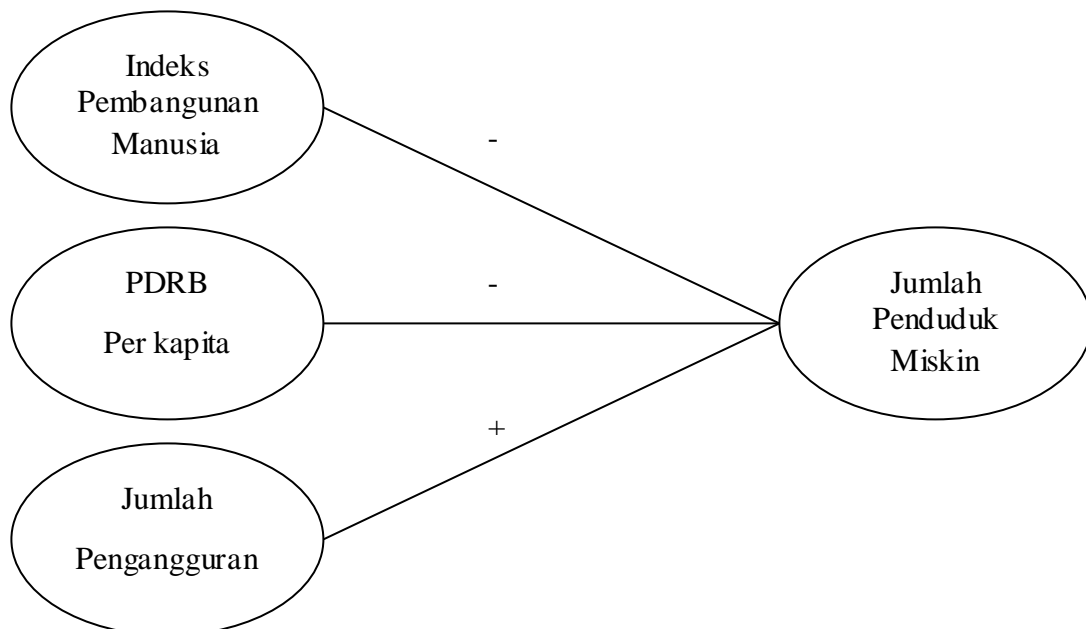
Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara (Lincoln Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna Amijaya (2008) mengatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Jumlah pengangguran juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dengan kondisi masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur tidak memiliki penghasilan, maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi seperti ini akan membawa dampak bagi terciptanya kemiskinan (Lincoln Arsyad, 1999).

Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin dalam suatu kerangka pemikiran seperti berikut :

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
2. PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
3. Jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. (M. Nasir, 1998). Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independent dan variabel dependen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008.

2. Variabel Independen

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran.

Sedangkan definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk miskin

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat

adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam satuan jiwa.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang

kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Data IPM yang digunakan adalah data IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2008.

3. PDRB per kapita

PDRB per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk di setiap wilayah Kabupaten/Kota Jawa Tengah (BPS). Data PDRB per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita tahun 2008 atas harga konstan tahun 2000. Variabel ini memiliki satuan rupiah.

4. Jumlah pengangguran

Jumlah pengangguran menurut BPS (2008) adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekaerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. Data jumlah pengangguran yang digunakan adalah jumlah pengangguran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008. Variabel ini memiliki satuan jiwa.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis jumlah penduduk miskin, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data jumlah penduduk miskin, data indeks pembangunan manusia, data PDRB per kapita, dan data jumlah pengangguran. Data yang digunakan sebagai latar belakang berupa tahun periode 2006-2008. Sedangkan data yang digunakan sebagai observasi adalah data antar ruang (*cross section*) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diambil adalah data seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota. Tahun yang dipilih adalah tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya melalui data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa, dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun arsip. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Meliputi data jumlah

penduduk miskin, data Indeks Pembangunan Manusia, data PDRB per kapita, dan data jumlah pengangguran.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang menggunakan data antar ruang (*cross section*) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.

3.4.1 Analisis Regresi

Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen (Gujarati, 1999). Dalam analisis ini dilakukan bantuan program *Eviews 4.1* dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya.

Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

$$POV_t = \beta_0 \cdot IPM_t^{\beta_1} \cdot PDRBK_t^{\beta_2} \cdot U_t^{\beta_3} \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan :

- POV_t = Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.
 IPM_t = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.

$PDRBK_t$ = PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.

U_t = Jumlah pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.

Namun dikarenakan adanya perbedaan satuan hitung masing-masing variabel independen, maka analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Log}(POV_t) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(IPM_t) + \beta_2 \text{Log}(PDRBK_t) + \beta_3 \text{Log}(U_t) + e \dots\dots\dots (3.2)$$

Alasan menggunakan analisis regresi dalam transformasi log adalah (Gujarati, 1999):

1. Parameter (β) dapat langsung menunjukkan koefisien elastisitas, yaitu persentase perubahan dalam variabel dependen untuk persentase perubahan tertentu dalam variabel independent.
2. Gejala heterokedastisitas dapat dikurangi karena tranformasi logaritma akan dapat memperkecil skala variabel-variabel yang diukur.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji asumsi klasik normalitas mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan μ_t memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2003).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera Test* (J-B *Test*) dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B *Test*, yang dilakukan dengan menghitung nilai *skewness* dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai χ^2 (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal (Gujarati, 2003).

Model yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut :

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right] \sim X^2 \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan:

- n = ukuran sampel
- S = koefisien skewness
- K = koefisien kurtosis
- Ho = data berdistribusi normal
- Ha = data tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas JB lebih besar dari 0.05 berarti JB statistik tidak berbeda dengan 0 atau tidak menolak H_0 . Jika nilai probabilitas JB lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak.

3.4.2.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan log pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien. (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya

diketahui dengan melakukan Uji *Breusch-Godfrey Test* atau Uji *Langrange Multiplier* (LM).

Dari hasil uji LM apabila nilai *Obs*R-squared* lebih besar dari nilai X^2 tabel dengan *probability* $X^2 < 5\%$ menegaskan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai *Obs*R-squared* lebih kecil dari nilai X^2 tabel dengan *probability* $X^2 > 5\%$ menegaskan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi.

Apabila data mengandung autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu (Wing Wahyu Winarno, 2008).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati, 2003). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standart errors and covariance* yang tersedia dalam program Eviews 4.1. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai *F* dan *Obs*Rsquared*, secara khusus adalah nilai *probability* dari *Obs*Rsquared*. Dengan uji *White*, dibandingkan *Obs*R-squared* dengan χ (*chi-squared*) tabel.

Jika nilai *Obs*R-squared* lebih kecil dari pada χ tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model.

3.4.2.4 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel independen (Gujarati, 2003). Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penaksiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas akan dilakukan dengan menggunakan *auxilliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi *auxiliary* maka didalam model tidak terjadi multikolinearitas. Model *auxilliary regression* adalah :

$$F_t = \frac{R^2 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \dots X_k / (k-2)}{(1-R^2 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \dots X_k) / (N-k+1)} \dots \dots \dots (3.4)$$

3.4.3 Uji Statistik

3.4.3.1 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Uji t menggunakan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

- i). Uji t untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - a) $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah).
 - b) $H_1 : \beta_1 < 0$ (ada pengaruh negatif antara Indeks Pembangunan Manusia dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah).
 - c) Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- ii). Uji t untuk variabel PDRB per kapita (PDRBK)
 - a) $H_0 : \beta_2 = 0$ (tidak ada pengaruh antara PDRB per kapita dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah).
 - b) $H_1 : \beta_2 < 0$ (ada pengaruh negatif antara PDRB per kapita dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.).
 - c) Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- iii). Uji t untuk variabel Jumlah Pengangguran (U)
 - a) $H_0 : \beta_3 = 0$ (tidak ada pengaruh antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah).
 - b) $H_1 : \beta_3 > 0$ (ada pengaruh positif antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah).

- c) Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika t -hitung $>$ t -tabel maka H_0 ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
 b) Jika t -hitung $<$ t -tabel maka H_0 tidak ditolak, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan (Gujarati, 2003) :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

H_1 : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (N - K)} \dots \dots \dots (3.5)$$

Dimana :

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila F hitung $<$ F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila F hitung $>$ F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kebenaran model analisis regresi. Dimana apabila nilai R^2 mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan. Sedangkan menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R^2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted R^2* yang dirumuskan:

$$AdjR^2 = 1 - \left(R^2 \left(\frac{n-1}{n-k} \right) \right) \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana:

- R^2 : koefisien determinasi
- k : jumlah variabel independen
- n : jumlah sampel